



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 17 Januari 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA
UNIT KERJA : BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

I. DATA PRIBADI

1. Nama : HARI YULIANTO
2. Jabatan : KEPALA SUKU BADAN
3. NHK : 442064

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp. 4.018.000.000**

1. Tanah Seluas 58 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA SELATAN ,
HASIL SENDIRI Rp. 600.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 211 m2/109 m2 di KAB / KOTA KOTA
JAKARTA SELATAN , HASIL SENDIRI Rp. 2.000.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 81 m2/54 m2 di KAB / KOTA ---,
HASIL SENDIRI Rp. 250.000.000
4. Tanah Seluas 27 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA SELATAN ,
HIBAH DENGAN AKTA Rp. 500.000.000
5. Tanah Seluas 488 m2 di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI
Rp. 218.000.000
6. Tanah Seluas 1675 m2 di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI
Rp. 450.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp. 693.700.000**

1. MOBIL, SUZUKI ERTIGA GX Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp.
132.000.000
2. MOTOR, HONDA BEAT Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp.
10.500.000
3. MOTOR, HONDA VARIO Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp.
13.000.000
4. MOBIL, TOYOTA FORTUNER Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp.
538.200.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA **Rp. ----**



D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	94.433.610
F. HARTA LAINNYA	Rp.	23.400.000
Sub Total	Rp.	4.829.533.610
III. HUTANG	Rp.	455.000.000
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	4.374.533.610

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.